

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konsep dan Batasan Konsep

Secara singkat definisi-definisi berikut memberikan gambaran serta arti bagi suatu definisi secara sederhana sebagai penghubung akan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

1. Kota Dan Kampung

Jika dilihat secara sederhana kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri, seperti apa yang di kutip pada Wikipedia. Selain itu, kota dibedakan secara kontras dari desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, atau status hukum. Namun seorang Arsitek dan pegiat kota, Marco Kusumawijaya, melihat bukan hanya persoalan jumlah dan bukan saja dualitas basis ekonomi pertanian (desa) atau industri non-pertanian (kota), dimana secara sosial-kultural, basis ekonomi tidak lagi menentukan desa dan kota, namun terlebih melihat bagaimana dan apa yang disebut dengan orang kota dan orang desa (Marco, 2006: 2). Hari ini keberadaannya adalah adanya orang kota bertani (di dalam kota) dan juga sebaliknya, ada petani menjadi buruh musiman di kota. Jadi bukan lagi orang desa atau orang kota, melainkan orang kota metropolitan, orang kota kecil, dan orang kota lebih kecil.

Banyak para ahli atau juga instansi yang memberikan definisi serta karakteristik mengenai kota, mengenai bagaimana suatu wilayah baru dapat dikatakan sebagai kota. Seperti apa yang di lansir oleh Standard Metropolitan Statistical Area (MSA) USA bahwa kota memiliki karakteristik seperti tempat yang memiliki penduduknya 50.000 (lima puluh ribu) jiwa atau gabungan 2 kota dengan total

penduduk 50.000 (lima puluh ribu) jiwa, gabungan kota-kota kecil dengan masing-masing jumlah penduduknya kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) jiwa, menunjukkan hubungan antara aspek ekonomi dan sosial, 75% penduduknya bekerja di sektor non pertanian, mayoritas penduduk bekerja di kota dan kepadatan penduduknya sekitar 375 jiwa / hektar.

UU No. 22 th. 1999 tentang otonomi daerah menjelaskan kota sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Max Weber memberi makna kota pada suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ciri kota adalah adanya pasar sebagai benteng serta mempunyai sistem hukum tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Dan menurut Bintarto (1983: 36), beranggapan bahwa kota sebagai kesatuan jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen serta coraknya materialistik. Masyarakat kota terdiri atas penduduk asli daerah tersebut dan pendatang. Masyarakat kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan. Mungkin pula kota dapat diartikan sebagai suatu permukiman yang dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian ruang dan hirarki tertentu. Seperti apa yang juga di katakan bahwa salah satu karakter dasar dari terbangunnya kota adalah keterbangunannya berdasarkan ketersediaan lembaga-lembaga yang bersifat militeristik. Selain itu kesamaan religius dan politik juga juga dianggap sebagai menjadi basis keterbangunannya suatu tempat menjadi kota (Ramdhon, 2006).

Jorge E. Hardoy (2005) dalam bukunya asal usul kebudayaan pemukiman menggunakan 10 kriteria secara lebih spesifik untuk

merumuskan kota: Pertama, ukuran dan jumlah penduduknya yang besar terhadap massa dan tempat. Kedua bersifat permanen. Ketiga, kepadatan minimum terhadap massa dan tempat. Keempat, struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan oleh jalur jalan dan ruang perkotaan yang nyata. Kelima, tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja. Keenam, fungsi kota minimum yang diperinci, yang meliputi sebuah pasar, sebuah pusat administratif dan pemerintahan, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktivitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama. Ketujuh, heterogenitas dan perbedaan yang bersifat hirarkis pada masyarakat. Kedelapan, pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas. Kesembilan, pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat. Dan kesepuluh, pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada massa dan tempat itu.

Kota pada umumnya memiliki banyak peran atau fungsi yang berbeda-beda, seperti Noel P. Gist (1974) yang menjelaskan kota sebagai pusat produksi, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Kemudian sebagai pusat perdagangan dan niaga, yang melayani daerah sekitarnya, sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibukota negara, kota sebagai pusat kebudayaan misalnya kota Vatikan, Makkah, Yerusalem, kota sebagai pusat pengobatan dan rekreasi wisata, misalnya Monaco, Palm Beach, Florida, Puncak Bogor, Kaliurung dan juga kota yang berfungsi ganda atau beraneka. Kota-kota pada masa kini (setelah perang dunia ke II) banyak yang termasuk kategori sebagai kota yang berfungsi ganda, contohnya Jakarta, Tokyo, Surabaya yang mencanangkan diri sebagai kota indarmardi (kota industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan), disamping sebagai pusat pemerintahan. Peran atau fungsi kota tersebut menjadi salah satu identitas dari kota. Ciri khas dari fisik (kondisi geografis,

situs/bangunan bersejarah) dan non-fisik (sosial, ekonomi, budaya) lingkungan dapat menjadi latar belakang identitas kawasan perkotaan tersebut.

Di lain sisi kampung dalam bahasa Minangkabau berkaitan dengan kehidupan yang sarat dan konsisten akan penerapan nilai-nilai tradisional. Di Aceh, gampong merupakan keseluruhan komunitas di sebuah desa (Atman, 1974). Kampung sebagai sebuah *enclosed compound* di dalam kota memiliki karakteristik tersendiri, di mana kehidupan sebuah desa (*village*) masih terdapat di dalamnya, yang masih nampak pada sistem sosial dan budaya yang mengikat. Akibatnya, keberadaan kampung ini mau tidak mau harus menjadi perhatian dan bagian dari kehidupan perkotaan, termasuk dalam proses perencanaan dan penataan kota. Hal ini tentunya mendorong kampung sebagai salah satu bagian pembentuk sebuah kota di Indonesia, sebagai bagian yang relevan atau sebuah alternatif pemecahan problem perkotaan.

Di Indonesia sendiri seperti dalam tulisan menuju kampung pemerdekaan pada dasarnya wilayah tempat tinggal memiliki tiga tipe permukiman jika di tarik secara garis besar (Khudori, 2002). Tipe pertama merupakan tipe permukiman yang terencana (*well-planned*), dengan penataan infrastruktur dan fasilitas yang lengkap dan dapat dijangkau oleh kendaraan bermotor. Dalam tipe ini bisa kita katakan bahwa pemukiman tersebut merupakan tipe pemukiman yang jauh lebih baik di dibandingkan dengan tipe lainnya. Akses kendaraan yang memadai, fasilitas umum yang tersedia bagi siapapun, dan struktur bangunan yang lebih “kokoh” menjadi ciri tersendiri dalam mengenali tipe pemukiman yang terencana (*well-planned*). Sedangkan tipe kedua adalah tipe kampung, dengan rumah-rumah yang berada di dalam, kebanyakan tidak dapat dijangkau dengan mobil maupun motor. Seperti pada umumnya bagaimana ciri tersendiri dari kebanyakan kampung di Indonesia adalah posisi antar rumah yang saling berhimpit

sehingga hanya menyisakan sebagian kecil ruang sebagai jalan keluar masuk, atau bisa juga dikatakan banyaknya gang gang atau jalan tikus. Tipe ini adalah tipe permukiman lama/asli kota-kota di Indonesia.

Sedangkan tipe ketiga adalah permukiman pinggiran/kumuh (*squatter*) yang banyak bermunculan pada ruang-ruang marjinal kota, seperti tepi sungai atau di tanah milik negara. Kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Dari segi sosial ekonominya pun masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Dan dampak dari kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya. Tipe ini juga sering disebut dengan tipe kampung illegal.

Di samping itu terlepas dari formalitas bentuk maupun aturan-aturan pembangunan, nampaknya kampung lebih menggambarkan segi humanitas dan urbanitas kehidupan kota yang saat ini mulai dicari kembali oleh negara-negara maju melalui konsep *New Urbanism*. Kampung kota merupakan fenomena yang banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang, dimana pertumbuhan pola sosial dan budaya masyarakat berbeda dengan tuntutan kehidupan kota, jika dipandang dari sudut universalisme nilai dan kehidupan perkotaan modern.

Pada dasarnya pengertian kampung kota yang dapat disepakati semua pihak belum dapat dipastikan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan di dalam cara pandang maupun disiplin ilmu yang digunakan oleh para pakar. Namun yang menarik adalah tersirat

adanya “kepadatan” dan “kemiskinan”, dan sama-sama menyatakan bahwa kampung merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kota. Namun beberapa pakar mendefinisikan kampung kota sebagai kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut *slum* atau *squater*. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa kampung kota adalah suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia dengan ciri antara lain: penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan bangunan dan penduduk tinggi, serta sarana pelayanan dasar serba kurang.

Peranan kampung di dalam perkotaan sendiri menjadi penting adanya. Kampung memiliki andil bahwa tidaklah ada dan terciptanya kota jika tidak ada kampung-kampung di dalamnya. Bagaimanapun kampung sebagai cikal bakal dari lahirnya sebuah perkotaan yang besar. Dalam konteks ini pun kampung yang berada pada posisi kota memiliki fungsi krusial sebagai tempat tinggal bagi mereka, orang-orang yang beraktivitas di perkotaan. Kebanyakan mereka akan kembali pulang ke rumahnya yang berada di sekitar kota. Misalnya kenyataan seperti di Semarang bahwa orang-orang yang bekerja di pusat perkotaan antara Simpang Lima ataupun segitiga emas (antara Jalan Pemuda, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pandanaran) maka hunian mereka bertempat di sekitaran kampung Plampitan, Sekayu, Jayenggaten dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikatakan oleh perencana kota Johan Silas, bahwa kota sesungguhnya hanya bisa ditemukan di kampung-kampung, dan oleh karena itu pelestarian kampung dalam menghadapi penyebaran pusat perbelanjaan, hotel-hotel modern dan gedung-gedung tinggi yang tidak dapat terbendung

lagi, sangatlah penting untuk menjaga kelayakan huni dari kota-kota tersebut (Ramdhon, 2016).

Hadirnya kampung yang berada di tengah perkotaan pun sudah menggejala sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kampung kota mulanya terbentuk sebagai kampung pribumi di kota-kota pada masa kolonial. Sedang lingkungan permukiman kampung kota merupakan suatu kesatuan dalam ketidak teraturan yang lahir dari sistem struktur sosial. Prinsip hirarki dan otoritas pemerintah tidak dianut oleh masyarakat. Lingkungan ini berpotensi membentuk suatu budaya tinggal yang berlandaskan pada kehidupan yang tidak otoriter, siap dan terbuka terhadap setiap perubahan. Budaya bermukim di kampung kota mungkin pula memiliki suatu strategi yang sangat tepat dalam bergaul dengan kemiskinan dan keterbatasan lahan. Dalam kampung kota yang padat terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan kondisi sosial budaya ekonomi penduduknya. Namun meskipun tampilan fisik kampung kota terlihat tidak teratur, sesungguhnya menyimpan vitalitas, kejutan, degupan dan misteri tersendiri. Dari berbagai pengertian tersebut dan dengan melihat fakta di lapangan dapat dikatakan permukiman Kampung kota adalah istilah untuk permukiman yang rakyat yang berupa kantung-kantung perumahan yang padat di kota-kota besar. Permukiman kampung kota dapat juga dikatakan sebagai permukiman vernakular mengacu kepada Free Encyclopedia. Wikipedia yang mendefinisikan istilah arsitektur vernakular sebagai terminologi akademik untuk mengkategorikan struktur yang dibangun di luar tradisi akademik, termasuk di dalamnya variasi yang luas meliputi berbagai bangunan dengan berbagai fungsi.

Permukiman kampung di kota akan menjadi permasalahan jika lambat laun keberadaannya akan hilang satu persatu. Permasalahan yang berkenaan dengan permukiman kampung kota tidak bisa hanya dituduhkan pada satu kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah saja karena mencakup banyak dimensi yang saling terkait. Jika

ditelusuri lebih jauh banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kebijakan pemerintah kota, urbanisasi, ketidakdisiplinan, ketidakadilan terhadap masyarakat miskin dan berbagai masalah lain yang harus diurai satu persatu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut di atas maka diperlukan perencanaan pembangunan permukiman yang melibatkan masyarakat setempat yang menjadi kelompok sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat permukiman kampung kota.

2 Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dilihat sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih singkatnya terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Seperti dalam karya Ritzer (2012) yang mengatakan perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu. Secara sederhana dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan yakni perbedaan, pada waktu berbeda, dan diantara keadaan sistem sosial yang sama. Strasser dan Randall menyebutkan dalam berbicara mengenai perubahan maka yang hadir adalah sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat, meski terus berubah (Sztompka, 2007: 3).

Bila dilihat dalam definisi para ahli maka banyak yang menterjemahkan apa makna dari perubahan sosial. Seperti H.T Mazumdar yang mengatakan “*Social change may be defined as a new fashion or mode, either modifying or replacing the old, in the life of people or in the operation of society.*” Dimana perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai fashion baru atau mode, baik memodifikasi atau mengganti yang lama dalam kehidupan orang dalam pengoperasiannya di masyarakat. Bahwa perubahan sosial dapat digambarkan seperti fashion, dapat berubah-ubah dan mengganti yang lebih modern dan

juga diterapkan di dalam kehidupan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan individu.

Dalam penjelasan lain dipahami bahwa perubahan itu didefinisikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan perubahan itu sendiri bisa berupa kemunduran dan kemajuan. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam suatu siklus kurun waktu tertentu atau secara terus menerus yang juga bisa disebabkan karena adanya berbagai faktor yang dapat mendorong perubahan di masyarakat. Sedangkan masyarakat didefinisikan sebagai wadah dimana individu-individu di dalamnya saling berhubungan dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Sehingga perubahan dalam kerangka masyarakat secara umum menyangkut perubahan pada elemen-elemen yang terdapat di dalam masyarakat. Baik itu pada sistem nilai, struktur ataupun sistem perilakunya. Atau dalam bahasa lain, proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang lama menjadi pola perilaku dan seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, berkembang dan berkesinambungan (Ramdhon, 2011). Konsekuensinya adalah pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang paling kontemporer.

Di sisi lain, perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen seperti unsur-unsur pokok, hubungan antar unsur, berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem, pemeliharaan batas, subsistem, ataupun lingkungannya. Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas

ruang lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit.

2.1 Urbanisasi

Terlepas dari hal diatas maka kota tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dengan apa yang disebut urbanisasi. Kota dan urbanisasi menjadi satu-kesatuan. Orang bergerak dari daerah pinggir menuju pusat kota, atau jika meminjam istilah Marco maka orang kota kecil bergerak masuk ke dalam kota metropolitan, juga sebaliknya. Keadaan setiap hari bagi mereka yang masuk dan keluar dari kota metropolitan menjadi pemandangan keseharian kota-kota besar, lebih khusus di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Peningkatan teknologi, ketersediaannya lahan pekerjaan, serta meningkatnya sektor pertanian menjadi segelintir pendorong terjadinya urbanisasi. Namun pada kondisi tersebut berakibat parah jika ternyata ruang-ruang terbuka bukan untuk menyediakan lebih banyak pemukiman, melainkan justru pemukiman yang semakin berkurang dan digunakan untuk ruang komersil yang ternyata *over supplied* dan menghantar ke krisis.

Wiryomartono (1999) menyebutkan bahwa urbanitas adalah kondisi efisien di perkotaan sehingga sumber-sumber dapat terkelola dan terkendali, yang mudah dicapai bila tempat tinggal mantap dan menetap. Urbanitas berada di lingkungan binaan manusia yang memiliki struktur dan wujud yang bisa dan layak ditinggali, yang oleh karenanya adalah proses yang mempertautkan sekelompok manusia dan tempat tinggalnya melalui aktivitas sosial ekonomi yang dicapai melalui kegiatan membangun dan membina kehidupan bermasyarakat. Dari

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa urbanitas merupakan kinerja dari sebuah kota, dimana sumber-sumber daya yang ada dapat memiliki peran masing-masing sehingga menciptakan keterkaitan dan hubungan yang saling menguntungkan. Kuncinya adalah terletak pada upaya untuk mendefinisikan kembali komponen-komponen kota dengan perannya masing-masing sebagai kekuatan-kekuatan untuk berproduksi. Sehingga apakah yang baru dari urbanitas? Nampaknya selama ini sistem perkotaan telah mengabaikan karakteristik urbanitas tersebut. Kekuatan ekonomi dan upaya penyesuaian terhadap pasar global dan modernitas telah menghilangkan dan menyingkirkan satu atau lebih komponen urbanitas tersebut. Urbanitas bukanlah hal baru, melainkan urbanitas adalah hakekat bagaimana seharusnya 'berkota'. Sehingga apapun bentuk sistem ekonomi dan sosial yang dianut, maka harus dapat menciptakan kondisi dan peran yang berimbang bagi seluruh komponen pembentuk kota dalam membentuk urbanitas. Karena itu upaya untuk mendefinisikan kembali esensi dan karakteristik berkota merupakan langkah awal yang nampaknya ditempuh untuk memunculkan apa yang disebut 'urbanisme baru' yang bukan hal baru.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengacu dari penelitian terdahulu yang dilakukan di Semarang, yaitu penelitian yang berjudul "*Kebertahanan Kampung Tua Sekayu Terkait Keberadaan Mal Paragon di Kota Semarang*" karya Eggy Evansyah dan Santy Paulla Dewi dalam Jurnal Ruang Vol.2 No.1 (2014; 301-310). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kampung yang ada di Kota Semarang terancam keberadaanya karena pembangunan kawasan perdagangan dan jasa, karena pembangunan menggusur kawasan kampung. Salah satu kampung yang terancam di Kota Semarang yaitu Kampung Sekayu sejak tahun 1413 ditunjukan dengan adanya Masjid Taqwa Sekayu yang merupakan masjid tertua di Kota Semarang. Kampung Sekayu terancam

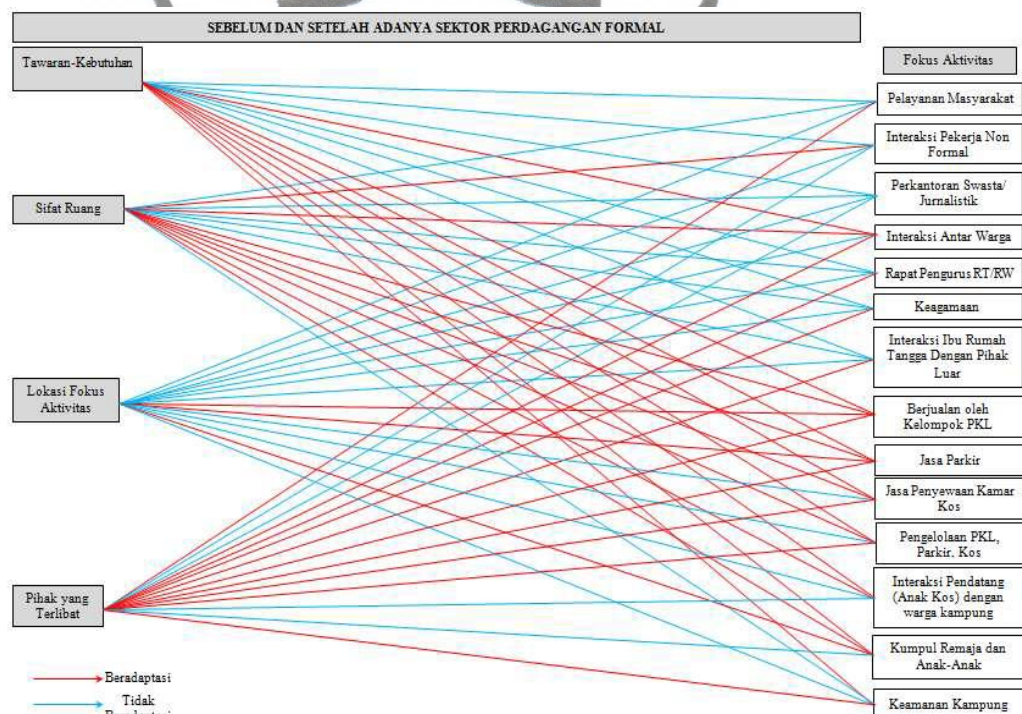
karena pembangunan Mal Paragon yang telah menghilangkan salah satu yang ada di Kampung Sekayu sebagai lahan parkir motor. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kebertahanan di Kampung Tua Sekayu sebagai kampung tua di Kota Semarang. Metode penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif dengan alat analisis berupa statistik deskriptif, analisis spasial.

Hasil penelitian adalah Kampung Sekayu tidak dapat bertahan dengan keberadaan Mal Paragon di Kota Semarang. Mal Paragon memberikan dampak bagi Kampung Sekayu karena menambah jumlah penduduk pendatang yang mempengaruhi semua aspek yang ada. Dapat dilihat hasil analisis fisik berupa penggunaan lahan bahwa digusurnya RT 1 yang dijadikan lahan parkir, fungsi yang bangunan yang berubah menjadi tempat kos dan tempat berdagang seiring dengan pembangunan Mal Paragon, serta bentuk bangunan yang hanya 1% sesuai dengan bentuk bangunan asli sesuai sejarah kawasan dan non fisik berupa aktivitas sosial dapat dilihat bahwa masyarakat jumlah ketidakhadiran sangat berkurang karena penduduk asli terpengaruh oleh penduduk pendatang yang individualis, serta aktivitas budaya yang telah hilang di kawasan Kampung Sekayu karena lokasi budaya digusur.

Kemudian Wulan Dwi Purnamasari dalam Jurnal TATA LOKA Vol.15 No.2 Biro Penerbit Planologi UNDIP (2013; 140-159) yang berjudul *“Konseptual adaptasi ruang kampung kota sebagai akibat keberadaan sektor perdagangan formal (Kampung Sekayu Kota Semarang)”* menjelaskan bahwa menjamurnya sektor informal secara perlahan mempengaruhi penggunaan ruang dan berpengaruh pada bentuk morfologi Kampung Sekayu dilihat dari perubahan arah sirkulasi maupun pergerakan dan perubahan ruang untuk interaksi. Model perubahan/penyesuaian Kampung Sekayu ditampilkan dalam bentuk matriks, diagram, dan mapping dengan menggunakan simbol yang diadaptasi dari teori Zahnd (2008) dimana sebelumnya dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui kategori perubahan yang terjadi. Dengan bertitik tolak pada teori Lazarus (1984) mengenai penyesuaian, maka dari hasil penelitian itu terlihat bahwa aktivitas warga di Kampung Sekayu merupakan bentuk adaptasi karena warga berusaha menjadi bagian dari berkembangnya

sektor perdagangan formal yang cukup pesat. Setiap aktivitas membutuhkan ruang sebagai wadah. Dalam hal ini, perubahan ruang yang terjadi di Kampung Sekayu merupakan bentuk *adjustment* karena beberapa ruang yang tersedia (seperti ruang publik) difungsikan untuk mendukung usaha yang dilakukan dalam hal ini usaha oleh PKL dan tukang parkir.

Adaptasi sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko konflik sosial yang akan timbul antara sektor perdagangan formal dan perkampungan warga. Seluruh adaptasi yang terjadi dimulai dari perubahan perilaku warga setempat dalam menerima keberadaan sektor perdagangan formal yang ada dan berusaha membaaur ke dalam aktivitas baru yang mereka timbulkan. Dalam paparan ini akan dibahas mengenai model adaptasi warga Kampung Sekayu yang dilihat dari perilaku dan aktivitas yang ditimbulkan sebelum dan setelah keberadaan sektor perdagangan formal di wilayah lingkungan hunian mereka.



Gambar 2.1

Diagram Konsep Adaptasi Fokus Aktivitas Warga Kampung Sekayu

(Sumber: TATA LOKA, VOL.15 NO.2)

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa adaptasi terjadi pada kegiatan sewa-menyewa, PKL, parkir, dan usaha lainnya dimana sebelumnya jumlah warga yang terlibat dalam aktivitas ini sangat kecil dan keberadaannya tidak diorganisir. Namun karena melihat peluang ekonomi yang cukup besar sejak mulai bermunculannya sektor perdagangan formal dan meningkatkan permintaan akan sektor informal sebagai pendukung maka saat ini aktivitas tersebut semakin menjamur di Kampung Sekayu. Bahkan beberapa penduduk Kampung Sekayu memilih untuk beralih profesi menjadi tukang parkir atau membuka usaha dagangan karena alasan peningkatan taraf ekonomi keluarga. Sedangkan untuk aktivitas sosial seperti bercengkrama dan bertegur sapa antara pendatang (anak kos) dan warga setempat juga mengalami penyesuaian. Saat ini kecenderungan aktivitas tersebut dilakukan semakin kecil dengan intensitas waktu dan kuantitas orang yang terlibat mengalami penurunan.

Perubahan aktivitas warga Kampung Sekayu menyebabkan beberapa fungsi ruang juga mengalami perubahan atau dapat dikatakan menyesuaikan dengan lingkungan yang dikelilingi oleh sektor perdagangan formal. Model penyesuaian fisiologi ruang menggambarkan bentuk penyesuaian secara adjustment. Dicontohkan keberadaan sektor perdagangan formal menyebabkan munculnya beragam usaha yang menjadi pendukung sektor tersebut, salah satunya usaha kos. Sebelumnya pemilik hunian memfungsikan keseluruhan ruang di dalam rumahnya sebagai ruang privat dan keluarga. Namun dengan melihat peluang ekonomi yang ditimbulkan kondisi sekitar, maka sebagian ruang rumah dijadikan sebagai ruang bagi kegiatan usaha seperti warung atau disewakan untuk menjadi tempat kos. Pemilik pun membagi fungsi rumah. Umumnya lantai 1 atau bagian depan rumah dijadikan sebagai ruang pribadi pemilik rumah. Sedangkan lantai 2 atau bagian belakang rumah disewakan untuk kepentingan ekonomi.

Bentuk penyesuaian yang terakhir adalah morfologi ruang kampung yang digunakan oleh warga dimana bergantung pada fungsi ruang yang diberlakukan sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Penyesuaian morfologi ruang ini pun merupakan bentuk penyesuaian secara adjustment. Adaptasi

morfologi ruang dilihat dari struktur fungsi, struktur sirkulasi, struktur kavling, dan organisasi ruang. Dari hasil pemodelan penyesuaian morfologi ruang maka kecenderungan untuk aktivitas sosial saat ini berlangsung di sebelah barat Kampung Sekayu (RT 03, 04, 06 dan 07) atau pada wilayah RT yang tidak dilalui Jalan Raya Sekayu. Hal ini disebabkan karena volume kendaraan atau pergerakan di Jalan Raya Sekayu yang mengalami peningkatan. Sedangkan diketahui bahwa jalan tidak hanya menjadi ruang sirkulasi namun juga menjadi media warga untuk berinteraksi. Dari model penyesuaian morfologi/ bentuk pun memperlihatkan warga mencoba membentuk permukiman mereka agar tetap kondusif dengan memberikan palang di beberapa ruas jalan dan diaktifkan hingga batas waktu berkunjung

Hal yang sama mengenai kepadatan juga terjadi di Gorontalo. Sebuah studi yang dilakukan oleh Heryati dalam penelitiannya yang berjudul “Kampung Kota Sebagai Bagian dari Permukiman Kota” menemukan bahwa studi tipologi ruang yang terjadi di kawasan Gorontalo seluruh gejala mengandung unsur “kesementaraan”. Hunian yang sudah padat ini cenderung akan terus memadat. Keberadaan ruang dengan fungsi tumpang tindih akan terus berlanjut. Pertambahan ruang secara vertikal cenderung akan menjadi cara untuk terus meningkatkan fungsifungsi hunian yang semakin kompleks. Ruang hunian yang terbentuk adalah cenderung sebagian besar sebagai ruang usaha. Semakin keluar fungsi ruang semakin mengarah pada fungsi perdagangan dan perkantoran karena posisinya yang berada dipinggir jalan besar. Ruang hunian terkecil bila dikurangi dengan fungsi usaha adalah 24 meter persegi. Oleh karena tipe ini merupakan tipe terkecil yang diperlukan bagi mereka yang telah berkeluarga. Sedangkan untuk pekerja yang hanya menempati ruang tidur unit terkecil adalah 18 meter persegi. Ruang terbuka untuk mengaktualisasikan keinginan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan diperlukan yang dapat menampung kebutuhan dan keinginan seluruh penduduk yang heterogen ini. Ruang terbuka hijau juga perlu di munculkan disini dikarenakan sangat minimnya ruang hijau di wilayah ini. Kampung kota mengarah kepada sistem otonomi yang tinggi dalam memenuhi

kebutuhan rumah dan kenyataan hingga saat ini pasokan perumahan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dengan cara-cara spontaneous. Dengan demikian maka kampung sebagai proses pemenuhan kebutuhan rumah melalui informal proses, mempunyai potensi yang besar dalam national housing supply, compatible dengan budaya penghuni.

Penelitian ini juga melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar Semarang, seperti Kampung Bandan. Ancol, Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfud et al. (2017) dalam penelitiannya berjudul “Mewujudkan Kampung Bandan sebagai Kampung Kota Berkelanjutan dengan Menggunakan Pendekatan Asian New Urbanism”, menemukan kepadatan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh kampung ini, dengan perbandingan kebutuhan ruang terbuka yang minim, derajat ketertutupan ruang, dan keterdekatan antar bangunan. Kepadatan dan keterbatasan dapat mengurangi kreativitas bagi manusia penghuninya untuk bertindak dan berperilaku. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak akan ada ruang-ruang sisa di dalam kampung Bandan. Dengan segala permasalahan yang ada maka perlu diadakan suatu penataan kampung yang berkelanjutan. Penataan yang benar akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik di dalamnya.

Penataan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Menurut penelitian Nugroho (2010: 218) menyatakan kampung dapat menjadi sumber peradaban, kreativitas maupun budaya kota karena kondisi dan keterbatasan yang ada. Lokalitas yang terkandung pada tatanan kampung akan memberi karakter bagi pembentukan semangat urbanisme baru yang sesuai dengan karakter masyarakat, berakar pada ideologi bermukim yang berkelanjutan. Dengan menggali potensi sosial, ekonomi maupun budaya dan karakter bermukim di kampung, maka akan merupakan dasar bagi pembentukan paradigma baru perancangan permukiman di Indonesia menuju pada pembentukan urbanitas dan ruang kota yang lebih berkualitas. Penguatan karakter lokal bukan lagi sekedar langkahantisipasi melainkan sebagai kekuatan yang harus dipadukan dengan proses modernisasi tersebut. Kepadatan (densitas, kompak) adalah karakter kampung kota di Asia

yang mampu menjembatani dua pandangan (barat dan timur) dalam menelusuri karakter fisik lokal (physical approach).

Dalam tulisan Ir. Wiwik Widyo Widjajanti dari Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya yang berjudul “Menciptakan Kampung Kota Sebagai Hunian Yang Ramah Dalam Konteks Urban Di Surabaya. (Studi Kasus: Kampung Kota Di Kawasan Tunjungan Dan Sekitarnya)”, berpendapat bahwa pola atau bentuk pemukiman yang ada pada kawasan Tunjungan perkembangannya terpengaruh oleh keberadaannya di tengah-tengah kota Surabaya sebagai pemukiman yang berada pada daerah perdagangan dan perkantoran; dan sebagai pemukiman lama yang menunjukkan ciri khas kota Surabaya. Seiring dengan perkembangan kota, timbul masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah kota terhadap pemukiman kota dengan kualitas rendah, dengan menggunakan konsep pendekatan kooperatif merupakan suatu pendekatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimal maksudnya dapat meminimalkan pihak yang dirugikan akibat dampak dari perkembangan kota tersebut. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk membantu masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, maka pemberdayaan bagi semua lapisan masyarakat menjadi penting. Pemberdayaan hanya dapat berjalan bila mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat berkembang secara positif. Untuk menjamin agar ada perkembangan mobilitas yang positif diperlukan ada kemampuan rumah tangga yang riil. Dari sini tampak jelas kedudukan penting dari rumah untuk berfungsi sebagai modal menggalang dan menggerakkan aspek produktifitasnya.

Keseimbangan antara rumah sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat berusaha tampaknya sangat beragam yang tergantung pada pendapatan dan pandangan yang dianut oleh rumah tangga tersebut dan lingkungan yang terkait, keuntungan yang mungkin didapat dan sifat dan kegiatan ekonominya, adanya kesempatan-kesempatan lain untuk meningkatkan taraf hidup dan lain sebagainya. Banyak upaya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan tanpa harus tergantung terlalu banyak pada dukungan dari luar,

baik dalam anti makro (dari lembaga seperti Bank Dunia) maupun mikro seperti Pemda yang tidak aktif untuk bersama dengan masyarakat berbuat perbaikan lebih bagi masyarakat dan keluarganya. Di masyarakat ada potensi yang besar dan mudah dibuat menjadi efektif. Sebagian dan potensi ini sudah efektif, namun masih banyak potensi lain yang menunggu diefektifkan. Banyak yang dapat dilakukan tanpa rasa Pesimis maupun tidak percaya terhadap kemampuan yang ada pada masyarakat. Kenyataan bahwa masyarakat itu bisa jarang mendapat perhatian secara sadar dan dimanfaatkan.

Berbeda dengan yang terjadi di Solo, dalam buku “Merayakan Negara Mematrikan Tradisi: Narasi Perubahan Kampung -Kota di Surakarta” yang ditulis Akhmad Ramdhon ini menjelaskan bagaimana kampung berubah mengikuti arus modernisasi kota dan dinamika struktural yang terjadi di kampung Baluwarti, kampung Kauman, dan kampung Laweyan. Kampung Baluwarti menjadi daya tarik utama di kota Surakarta, Keraton Kasunanan yang berada di dalam kompleks Baluwarti menjadi ikon yang sangat populer dalam memori publik. Memori akan sejarah kota tersebar dalam ruang-ruang yang menjadi bagian dari kota (keratin, makam, masjid, gapura, alun-alun, benteng, gedung), juga berbagai perayaan tradisi, adat istiadat, dan sebagainya. Semua yang menjadi bagian dari masa lalu ini bertransformasi dan dilekati nilai-nilai baru, nilai-nilai keindahan, hiburan, pengalaman, edukasi, serta dikemas dalam sebuah paket pariwisata bernilai dan bermuatan historical resources. Kini, pengembangan diarahkan pada upaya untuk menjadikan kawasan Baluwarti desa wisata budaya. Kampung Baluwarti hari ini menjadi salah satu kelurahan yang menjadi bagian dari Kecamatan Pasar Kliwon. Gagasan untuk mengembangkan desa wisata budaya Baluwarti didasarkan pada fakta bahwa selama ini daya tarik pariwisata di kawasan tersebut hanya tertuju pada Keraton, Pasar Klewer, serta acara-acara budaya yang diselenggarakan Keraton Kasunanan. Namun sejauh ini, pengembangan Baluwarti sebagai desa wisata budaya masih belum jelas karena pihak Keraton dan kelurahan belum sepaham tentang apa yang akan dilakukan.

Begitu juga dengan Kampung Kauman, secara administratif kini kampung. Kauman menjadi Kelurahan Kauman yang merupakan bagian dari Kecamatan Pasar Kliwon. Beberapa situs yang menandai eksistensi para qaum (ulama) di masa lalu masih ada di kelurahan ini, seperti Masjid Agung dan Langgar Sememen atau Trayeman, yang menyimpan memori tentang kehidupan para abdi dalem pamethakan dahulu kala. Deretan kios-kios pedagang buku-buku agama maupun peralatan ibadah kian menegaskan identitas santri yang selama ini melekat pada masyarakat Kauman. Beberapa bangunan besar merupakan sisa-sisa usaha batik yang dulu dikelola oleh istri-istri penghulu, kini beberapa diantaranya masih digunakan untuk memproduksi batik dan dijadikan show room untuk memasarkannya, sehingga mendorong Kauman membentuk Paguyuban Kampung Wisata Batik Kaoeman. Pengembangan kawasan Kauman sebagai kampung wisata batik terealisasi dan menjadi bagian dari program pembangunan di Kelurahan Kauman.

Berbeda dengan kedua kampung sebelumnya, kampung Laweyan lebih awal merealisasikan ide-ide pariwisata. Kini Laweyan diwarisi oleh generasi akhir para pengusaha batik dan menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Laweyan. Aktivitas perekonomian warga Laweyan didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan yang terkonsentrasi di industri-industri batik di rumah-rumah para pemilik usaha batik yang digunakan untuk memproduksi batik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin melihat proses pembuatan batik. Kombinasi antara arsitektur bangunan, batik, dan proses pembuatannya, serta situs-situs bersejarah, mendasari gagasan pengembangan kampung wisata Laweyan. Kesadaran untuk menginisiasi pengembangan wisata di Laweyan bermula dari para pemilik usaha batik yang ingin menghidupkan kembali kehidupan batik di kampung mereka, sehingga akhirnya mendirikan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan sebagai upaya komunikasi untuk menyinkronkan gagasan pengembangan wisata batik dengan agenda-agenda pengembangan pariwisata di kota Surakarta. Keterlibatan warga lewat forum tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Perubahan yang terjadi di ketiga kampung tersebut menjadikan kampung mereka lebih baik, namun pembangunan dan pengembangan kota cenderung meninggalkan tradisi. Akibatnya tradisi-tradisi hanya hadir di kalangan tertentu, sekalipun tradisi berupaya bertahan di tengah-tengah masyarakat, namun masyarakat dan struktur sosial pun berbeda. Kebijakan yang berlandaskan kepentingan ekonomi modern menjadikan tradisi-tradisi dalam kampung semata-mata instrumen dalam menggerakkan ekonomi dan dinamika kota. Kota Surakarta dengan seluruh dinamikanya tetap menyisakan berbagai aspek dan problematika yang layak untuk dikaji. Ruang-ruang yang ada di dalam ranah kota beserta memori-memori yang tertinggal disana menghadirkan masa lalu sekaligus memperlihatkan kepada kita bagaimana modernitas bekerja sebagai energi pendorong perubahan. Kota Surakarta dengan dinamikanya sendiri, sebagaimana kota-kota lain memiliki dinamika, tarik ulur, ketegangan, bahkan konflik atas terjadinya perubahan.

Salah satu contoh lain dari dinamika kampung kota yang kehilangan budaya lokalnya adalah kampung batik Prawirotaman. Perubahan total menjadi bisnis penginapan telah menghilangkan modal budaya yang dimiliki Kampung Prawirotaman (Sumbarsih & Adrianto, 2014). Rumah-rumah batik khas rumah Jawa telah berganti dengan bangunan-bangunan modern. Tidak hanya itu tradisi yang dulu dimiliki warga di kampung tersebut saling kumpul, bergotong royong, dan berekspresi dalam kesenian dan kegiatan lainnya sudah tidak dilakukan lagi. Kampung Prawirotaman sebagai kampung turis sekarang ini tidak memiliki modal budaya lagi setelah kerajinan batik hilang dari Kampung Prawirotaman. Kampung yang dulu memiliki kesenian, sekarang tidak memiliki lagi. Sampai sekarang tampaknya belum ada langkah-langkah warga Kampung Prawirotaman untuk menggali unsur-unsur budaya lokal setempat sebagai identitas Kampung Prawirotaman.

Adapun beberapa jurnal internasional yang pernah meneliti perihal kampung kota dan menjadi tambahan data pada penelitian kali ini antara lainnya:

Dalam jurnal yang ditulis oleh Tjahjono Rahardjo and Siti Rahma Mary Herwati dalam paper presented to the International Conference on the Urban Kampung, Surabaya, 19-22 January 2010 yang berjudul *Kampung Jayengaten: The emergence and disappearance of a kampung in Semarang* menegaskan bagaimana Kampung Jayengaten adalah pemukiman yang terletak di pusat kota Semarang. Kemunculannya adalah hasil dari semakin pentingnya Semarang sebagai salah satu pusat ekonomi dan politik terpenting di Jawa. Keberhasilan Semarang sebagai pelabuhan dan sebagai pusat perdagangan dan administrasi pada awal abad kedua puluh membawa serta masuknya orang, yang sebagian besar adalah orang Indonesia dari semua bagian Jawa dan pulau-pulau luar. Orang-orang ini menetap di bekas desa yang telah menjadi daerah padat; apa yang sekarang dikenal sebagai kampung (tidak direncanakan, permukiman perkotaan spontan), seperti Kampung Jayengaten. Dengan perluasan wilayah perkotaan Semarang, kampung-kampung ini secara fisik (jika tidak secara ekonomi dan sosial) tidak dapat dipisahkan dari kota. Selama rezim Suharto, yang melihat bisnis besar sebagai kunci pembangunan ekonomi, kampung sering dibongkar (dan penduduknya diusir) digantikan oleh penggunaan yang lebih menguntungkan secara ekonomi, seperti jalan tol, pabrik, blok kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dll. Meskipun Suharto telah digulingkan selama lebih dari satu dekade, pengusuran seperti itu terus terjadi di kota-kota Indonesia.

Kasus-kasus seperti itu telah terjadi sejak lama (dan masih terjadi) di seluruh Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan besar tetapi juga di desa-desa terpencil. Dapat dikatakan bahwa ini adalah warisan dari era Suharto. Seperti disebutkan sebelumnya, Soeharto melihat bisnis besar sebagai kunci pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, investor swasta diberi perlakuan istimewa. Sekarang, terlepas dari perubahan politik dalam dekade terakhir, elit penguasa, hingga mereka yang ada di tingkat kabupaten dan kota masih menganut pandangan ini.

Paling-paling, mereka benar-benar percaya bahwa membawa lebih banyak investasi secara otomatis akan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Namun, konsep kesejahteraan mereka terbatas pada perspektif ekonomi semata. Mereka percaya bahwa lebih banyak investasi, pada gilirannya, akan menghasilkan lebih banyak pendapatan asli daerah (PAD) dan kesempatan kerja. Yang terburuk, bagaimanapun, adalah ketika menarik lebih banyak investasi dilihat sebagai peluang untuk melakukan transaksi yang curang dengan investor. Dalam kasus seperti itu, kepentingan pribadi mereka yang berkuasa, berkolusi dengan mereka yang memiliki uang, akan merusak semua pertimbangan lain (seperti kepentingan masyarakat yang terkena dampak dan pelestarian lingkungan). Mengingat fakta bahwa meskipun "Reformasi" birokrasi Indonesia masih dipandang oleh banyak orang sebagai orang yang tidak jujur, tidak efisien dan terkenal korup, kemungkinan kedua tentu saja tidak dapat diabaikan. Dalam kasus apa pun, pejabat pemerintah cenderung melihat tanah dan sumber daya alam hanya dari segi ekonomi. Apa yang terutama ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengeksploitasi aset potensial ini. Ini sering menyebabkan konflik dengan orang-orang yang tinggal dan bergantung pada tanah untuk kehidupan mereka. Orang-orang melihat tanah lebih dari sekadar faktor produksi. Mereka melihat tanah memiliki makna budaya, sosial, emosional dan bahkan spiritual. Sebagai contoh, kita bisa melihat kontroversi seputar usulan pabrik semen di Kabupaten Sukolilo, Jawa Tengah. Para pendukungnya mengklaim bahwa selama konstruksi pabrik itu setidaknya akan secara langsung mempekerjakan 1000 orang lokal setiap bulan (meskipun agak kurang ketika pabrik mulai beroperasi). Kebutuhan akan warung makan, rumah kos dan usaha kecil lainnya akan mendatangkan lebih banyak uang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun para penentangannya menunjukkan risiko ekologis dari eksploitasi bukit kapur di Sukolilo untuk produksi semen. Dengan hancurnya bukit-bukit kapur, mereka takut bahwa 47 dari total 87 mata air bawah tanah akan mengering juga. Selain itu, mereka memperkirakan bahwa orang luar yang lebih berkualitas (dan bukan orang lokal) kemungkinan besar akan mengisi pekerjaan yang baru dibuat.

Tulisan Leoni Dwi Agita dan Rina Kurniati sebagai Student and Lecturer of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Diponegoro University, Semarang. Dalam jurnal E3S Web of Conferences **73**, 02020 ICENIS 2018, berjudul “*Realizing Kampung Pelangi as a Sustainable Village City Using Asian New Urbanism: Ideological Approach*” membahas bagaimana mewujudkan kampung pelangi yang berada di Semarang sebagai kampung kota yang berkelanjutan. Pasalnya posisi keberadaan Kampung Pelangi awalnya merupakan wilayah kampung yang kurang tersusun rapi dan dampaknya mengancam keberadaan kampung itu sendiri. Hingga pada akhirnya konsep kampung pelangi digunakan sebagai media dalam mempertahankan sekaligus kampung berkelanjutan.

Kampung Pelangi terletak di Jalan Wonosari III, Desa Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara administratif, Kampung Pelangi memiliki dua dusun (RW), yaitu RW III dan RW IV. Topografi daerah ini cukup terjal karena itu memiliki lereng yang tinggi dan bervariasi. Ini menghasilkan lokasi antara bangunan menjadi tidak teratur, tidak adanya jarak antara bangunan dan batas bangunan jadi untuk menciptakan kesan yang cukup solid. Awalnya, Kampung Pelangi adalah salah satu daerah kumuh di Kota Semarang bernama Desa Wonosari. Namun konsep warna di setiap dinding bangunannya memberikan keunikannya sendiri, sehingga menjadikan ini desa sebagai tujuan wisata. Kampung Pelangi punya interaksi sosial dengan dilakukan dalam bentuk komunitas pertemuan, antara kepala dusun dan lingkungan, membangun komunikasi antara tetangga dan kegiatan bermain anak-anak dan remaja.

Dalam tulisan Sri Rum Giyarsih dan Muh. Aris Marfai dalam Journal of Urban & Regional Analysis; Dec2017, Vol. 9 Issue 2, p129-139, 11p dengan judul “*Regional Transformation In Semarang City, Indonesia*” menerangkan jika Semarang merupakan kota dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi yang berubah dengan cepat, di Provinsi Jawa Tengah Indonesia daripada di tempat lain. Ia menunjukkan bahwa urbanisasi berlangsung paling cepat di mana ruang terbuka yang kosong dan investasi dalam berbagai jenis

infrastruktur publik baru dominan, terutama di kabupaten-kabupaten seperti Tembalang, Gunungpati, Genuk dan Pedurungan, yakni daerah-daerah yang berada di pinggir semarang atau dengan kata lain bukan berada di pusat kota.

Pada tahun 1990, Kota Semarang terdiri dari 9 kabupaten, lima di antaranya peringkat transformasi rendah ke menengah. Keempat kabupaten lainnya yang menunjukkan kapasitas transformatif tinggi memungkinkan Semarang secara keseluruhan untuk mencapai transformasi regional tingkat menengah - atau sekitar 56% dari jumlah maksimum yang dimungkinkan. Pada tahun 2000, Semarang secara administratif terdiri dari 16 kabupaten, mencerminkan terjadinya urban sprawl selama dekade sebelumnya. Konfigurasi kabupaten dan kota di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Dan Peraturan Pemerintah No. 50 pada tahun 1992 menegaskan perluasan Kota Semarang dari 9 - ditetapkan lama di masa lalu oleh Peraturan Pemerintah No. 16 pada tahun 1976 - ke 16 kabupaten. Penambahan tujuh kabupaten tambahan ke Semarang mencerminkan filosofi yang menarik bahwa wilayah yang lebih kecil memungkinkan pengelolaan dan pengembangan daerah yang lebih efisien.

Kabupaten-kabupaten yang mengalami perubahan dalam tingkat transformasi regional mereka dalam periode 1990 dan 2000 adalah Mijen, Tugu, dan Genuk. Dua yang pertama meningkat dari rendah ke menengah pada tahun 2000, sementara tingkat di Distrik Genuk meningkat dari menengah ke tinggi. Semua terletak di pinggiran CBD Semarang. Antara tahun 2000 dan 2012, peningkatan tingkat transformasi regional terjadi di tiga kabupaten dengan transformasi regional tingkat menengah pada tahun 2000, yaitu Mijen, Gunungpati, dan Tugu. Ketiganya mencapai status transformasi regional tingkat tinggi pada tahun 2012 dan mereka lagi terletak di pinggiran barat Semarang. Akibatnya, tingkat transformasi regional semua kabupaten Semarang secara kolektif pada tahun 2012 tinggi. Dengan demikian, dalam 22 tahun dari 1990 hingga 2012, Kota Semarang telah mengalami perubahan ke atas dalam laju transformasi regionalnya, yaitu dari tingkat menengah pada awal periode ke tingkat tinggi dari tahun 2000 hingga 2012. Karakteristik

kotanya berubah dari waktu ke waktu, yang sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Sejauh itu analisis telah berfokus pada transformasi regional Semarang dulu dan sekarang. Kota ini telah mengalami pertumbuhan populasi yang cepat dan perkembangan ekonomi sebagai konsekuensi dari posisi strategisnya di wilayah pinggir kota dan fungsinya sebagai simpul transportasi regional dan nasional. Menurut Wilonoyudho (2011), aglomerasi perkotaan spontan di sepanjang rute transportasi regional di Semarang sejajar dengan perubahan dalam struktur kegiatan komersial dan pada gilirannya organisasi spasialnya. Satu peristiwa yang sangat penting adalah pergeseran fungsi kota CBD dari manufaktur ke layanan bisnis dan masyarakat yang mengarah pada marginalisasi kaum miskin kota. Hotel-hotel mewah dan pusat perbelanjaan di pusat kota menggantikan tempat tinggal masyarakat adat dengan status sosial ekonomi rendah. Orang-orang 'pribumi' ini bukan kelompok etnis yang terpisah, tetapi mereka adalah penduduk jangka panjang yang serupa di kabupaten ini (yaitu pusat kota).

Kegiatan manufaktur seringkali membutuhkan ruang yang cukup besar, yang semakin sulit ditemukan di Kawasan Pusat Bisnis (CBD) Semarang. Dengan demikian, banyak kegiatan manufaktur telah memilih untuk ditempatkan di pinggiran kota di lokasi-lokasi seperti Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Fenomena ini menyimpulkan bahwa pembangunan perkotaan di pinggiran disebabkan oleh keberadaan jaringan transportasi yang memadai, kedekatan dengan pusat kegiatan (CBD), lalu preferensi orang yang meningkat untuk gaya hidup hunian dengan kepadatan rendah, serta perlunya situs besar oleh banyak industri dan layanan di perbatasan pinggiran kota. Pergeseran lokasi kegiatan manufaktur ke pinggiran Semarang memenuhi kriteria yang diidentifikasi berdasarkan yang baru saja dikutip. Oleh karena itu, banyak orang dan fungsi perkotaan, termasuk fungsi kegiatan manufaktur, memilih untuk tinggal dan tumbuh di pinggiran daripada di pusat kota Semarang.

C. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori konflik yang dikembangkan oleh Ralp Dahrendrof, yakni seorang ahli sosiologi lahir pada tanggal 01 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1993, Dahrendorf dianugerahi penghargaan gelar sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabeth II di Wesminister, London, dan di tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Princes of Asturias Award untuk ilmu-ilmu sosial. *Class and Class Conflict in Industrial Society* (1959), adalah karya utama Dahrendorf yakni bagian paling berpengaruh dalam teori konflik, tetapi pengaruh itu sebagian besar karena ia banyak menggunakan logika struktural-fungsional yang memang sesuai dengan logika sosiolog aliran utama. Artinya, tingkat analisisnya sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah yang diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik adalah bagian dari paradigma yang sama. Dahrendorf mengakui bahwa meski aspek-aspek sistem sosial dapat saling menyesuaikan diri dengan mantap, tetapi dapat juga terjadi ketegangan dan konflik di antaranya. Karya-karya lainnya pun seperti *The Modern Social Conflict Society* (Stanford University Press, 1959) University of California Press: Barkeley dan Los Angeles, 1988), *Reflection on The Revolution in Europe* (Random House, New York, 1990).

Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap Teori Fungsionalisme Struktural. Kalau menurut Teori Fungsionalisme struktural masyarakat dalam kondisi yang statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Teori konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka

yang berada di atas. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Sedangkan teoritis konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (Ritzer and Douglas, 2004: 153).

Masyarakat senantiasa dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsur. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi (Ritzer, 2013: 153). Teori konflik memandang masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.

Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan (KBBI, 2005: 587). Sedangkan dalam pandangan lain, menurut Soerjono Soekanto konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (1993: 99). Konflik juga merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (Narwoko dan Suyanto, 2005: 68). Istilah konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses

sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (Susan, 2010). Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dahrendorf adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat memiliki dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah-tengah masyarakat sementara teoritis konflik harus menelaah konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan-tekanan tersebut. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus, yang merupakan prasyarat bagi masing-masing. Jadi, kita tidak mungkin berkonflik kecuali terjadi konsensus sebelumnya.

Dahrendorf mengawali pembahasannya dengan banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia mencatat bahwa bagi para fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerja sama, sukarela, konsensus umum atau keduanya. Namun bagi teoritis konflik (koersi) masyarakat dipersatukan oleh “kekangan yang dilakukan dengan paksaan”, sehingga beberapa posisi di dalam masyarakat adalah kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas atas pihak lain. Fakta kehidupan sosial ini membawa Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor penentu konflik sosial sistematis.

Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Dia menyebut otoritas tidak terletak dalam individu tapi dalam posisi. Sumber struktur konflik harus dicari dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan. Menurutnya, tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat. Karena

memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu, Dahrendorf ditentang para peneliti yang memusatkan perhatian pada tingkat individual. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada disekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum, mereka tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol ditentukan di dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. Saat kekuasaan merupakan tekanan (koersif) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimasi dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan “authority”, dimana beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain.

Teori Fungsional	Teori Konflik
Masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang.	Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan
Menekankan keteraturan masyarakat.	Melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.
Setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas.	Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.
Cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral.	Melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas.
Memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat.	Menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat

Perbedaan antara otoritas dan kekuasaan, kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan

yang dilegitimasi kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Butiran yang penting sekali ialah bahwa suatu asosiasi yang harus dikoordinasi adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada (yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi) dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah sangat berbeda dari Parsons, keduanya melihat hal itu sebagai suatu keharusan walaupun Dahrendorf kelihatannya kurang senang dengan istilah "prasyarat fungsional" keduanya setuju bahwa suatu fungsi dari kekuasaan adalah untuk mengintegrasikan sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai-nilai. Sementara Parsons menekankan aspek integratif yakni kekuasaan dan otoritas menemukan kebutuhan-kebutuhan dari keseluruhan sistem.

Dahrendorf mengatakan hal itu bersifat memisahkan. Alasan untuk itu adalah bahwa hal itu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dan peran yang diharapkan. Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Dia mengatakan hal itu merupakan kepentingan objektif, yang terbentuk di dalam peran-peran itu sendiri, bersamaan dengan kepentingan atau fungsi dari semua peran dalam mempertahankan organisasi itu sebagai keseluruhan. Dunia sosial karenanya distruktur ke dalam kelompok-kelompok yang secara potensial mengandung konflik, apa yang dia sebut sebagai quasi group.

Hal ini tentu saja sejauh teori berkembang sebagai suatu teori, langkah berikutnya terdiri dari proposisi-proposisi empiris yang bersifat umum tentang kondisi-kondisi yang membuat kelompok-kelompok quasi menjadi kelompok-kelompok konflik. Kondisi-kondisi yang berbeda yang berakibat dalam tipe konflik yang berbeda dan kondisi-kondisi yang menentukan hasil-hasil berikutnya. Karena itu dibandingkan dengan fungsionalisme struktural maka teori Dahrendorf adalah suatu yang dalam tingkat rendah terbagi dalam dua bagian. Pertama, suatu proposisi teoritis pokok: bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang

bersifat komplementer. Kedua, deskripsi-deskripsi umum tentang kondisi yang mengakibatkan konflik (Effendi, 1986: 93).

Konsep sentral dari teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Dalam teori konflik wewenang dan juga kekuasaan merupakan faktor yang menentukan terjadinya konflik sosial. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti status quo. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan yang tertentu selalu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh

golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten.

Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok. Pertama adalah kelompok semu (quasi group) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Kelompok semu ini adalah calon anggota tipe kedua yaitu kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Dimana kedua kelompok ini telah dilukiskan oleh Dahrendorf seperti berikut. Mode perilaku yang sama adalah karakteristik dari kelompok kepentingan yang direkrut oleh kelompok semu yang lebih besar. Kelompok kepentingan yang ketiga adalah kelompok dalam pengertian sosiologi yang ketat dan kelompok ini adalah agen riil dari konflik kelompok. Kelompok ini mempunyai struktur, bentuk organisasi, tujuan dan program dan anggota perorangan. Dari berbagai kelompok itulah muncul kelompok konflik.

Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Sebagaimana dikatakan oleh Dahrendorf secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah di analisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.

Kepentingan yang dimaksudkan Dahrendorf mungkin bersifat manifest (disadari) atau laten (kepentingan potensial). Kepentingan laten adalah tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki

peranan tertentu, tetapi masih belum disadari. Ini adalah “perumusan psikologis” yang sama sekali bukan merupakan sasaran pengkajian sosiologis, kecuali mereka menjadi tujuan-tujuan yang disadari. Jadi orang dapat menjadi anggota suatu kelas yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi sebagai kelompok mungkin mereka tidak menyadari kekurangannya. Hal ini merupakan kasus dari banyak kelompok minoritas di tahun 1960-an kesadarannya telah memuncak, antara lain termasuk kelompok-kelompok kulit hitam, wanita, suku India dan Chicanos. Demikian kepentingan-kepentingan yang tidak disadari atau laten itu tampil kepermukaan dalam bentuk tujuan-tujuan yang disadari (persamaan gaji, persamaan kesempatan kerja), berkembanglah organisasi-organisasi yang disebut Dahrendraf sebagai kelompok-kelompok manifes. Misalnya sebelum tahun 1960-an sebagian besar wanita merupakan kelompok semu yang ditolak kekuasaan di sebagian besar struktur sosial di mana mereka berpartisipasi. Pada pertengahan tahun 1960-an berbagai kepentingan laten kaum wanita itu mulai muncul kepermukaan atau disadari, yang kemudian diikuti oleh perkembangan kelompok yang memperjuangkan kebebasan wanita. Jadi pertentangan antara kaum lelaki yang menduduki kekuasaan dan kaum wanita yang dikuasai diatur atau diredakan lewat organisasi structural.pertentangan yang telah berakar dan potensial diantara kedua jenis ini sekarang diatur lewat institusionalisasi pertentangan yang demikian. Menurut dahrendraf usaha yang mencoba untuk menekan atau menghapuskan pertentangan tersebut adalah sia-sia. Dalam masyarakat modern pertentangan itu harus diatur melalui institusionalisasi demikian kepentingan yang bertentangan itu disadari (Poloma, 1987: 135-137).

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain yakni kelompok semu (*quasi group*), kelompok kepentingan (*manifes*), dan kelompok konflik. Kelompok semu sendiri adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena

kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

Mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai) atau bawahan ingin supaya ada perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikiran Lewis Coser dimana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang, merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Di bawah kondisi ideal tidak ada lagi variabel lain yang diperlukan untuk dapat menerangkan sebab-sebab timbulnya konflik sosial. Dalam kondisi yang tidak ideal memang masih ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses terjadinya konflik sosial. Di antaranya kondisi teknik dengan personal yang cukup, kondisi politik dengan suhu yang normal, kondisi sosial dengan adanya rantai komunikasi. Faktor lain menyangkut cara pembentukan kelompok semu. Kalau pembentukannya cukup acak serta benar-benar ditentukan oleh kesempatan maka konflik kelompok tidak akan muncul.

Dengan demikian beda dengan pandangan Marx, Dahrendorf tidak merasa bahwa lumpen proletariat akan menjadi kelompok konflik kalau orang yang menjadi anggotanya terbentuk secara kebetulan. Malah sebaliknya kelompok semu yang pembentukannya ditentukan secara struktural memungkinkan untuk terbentuk menjadi kelompok kepentingan yang merupakan sumber pertentangan itu (Ritzer, 2013: 27-28).

Aspek terakhir dari teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dengan perubahan. Dalam hal ini Dahrendorf menganggap konflik adalah satu bagian dari realitas sosial, yang mana konflik tersebut juga bisa menyebabkan perubahan dan juga perkembangan. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana, selanjutnya masyarakat juga bisa memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Dahrendorf juga mengatakan bahwa setelah kelompok konflik muncul dan kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba.

Peneliti menggunakan teori konflik untuk menganalisis konflik serta perubahan sosial yang terjadi di Kampung Sekayu serta Kampung Jayenggaten dalam pengaruh hadirnya Mall dan Hotel di Semarang. Karena teori ini di anggap relevan dengan judul tersebut dimana dalam suatu masyarakat itu selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi secara terus menerus. Kekuasaan dan juga wewenang dapat merubah posisi atau struktur yang telah ada. Dari wewenang dan kekuasaan tersebut yang tidak berjalan dengan seimbang yang senantiasa membawa individu pada posisi atas dan posisi bawah yang akan menimbulkan dua golongan yang saling bertentangan yang mana golongan yang berkuasa ingin mempertahankan status quo sedangkan yang dikuasai ingin selalu mengalami perubahan. Dahrendorf membedakan golongan tersebut menjadi dua golongan yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan.

Keadaan yang terjadi ini dimana kekuasaan dan wewenang tidak berjalan dengan seimbang yang akhirnya menimbulkan dua golongan atau

kelompok, pertama yaitu kelompok warga Kampung Sekayu dan Jayenggaten, dan kedua kelompok dari pihak Mall dan Hotel. Dimana kelompok-kelompok ini saling bertentangan dalam masalah pembangunan.

D. Kerangka Berpikir

Semarang menjadi salah satu kota yang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut menandakan satu dari berbagai kota di Indonesia yang mengalami proses perubahan terus-menerus sehingga terkonstruksi berbagai konsep baru mengenai kota. Perubahan yang dialami tak terlepas dari keberadaan morfologi dan tipologi sebagaimana kota-kota yang mengalami perubahan seperti kota lainnya. Tak lepas pula dari pembangunan yang pada akhirnya menjadi salah satu tolak ukur dalam kemajuan suatu kota.

Pembangunan sebagai sebuah transformasi ekonomi, sosial maupun budaya yang secara sengaja dilakukan melalui kebijakan dan strategi yang disusun. Tata letak, fasilitas, ruang, ataupun elemen penting lainnya di dalam ruang lingkup kota menjadi suatu proses rencana pembangunan. Hadirnya gedung-gedung tinggi pencakar langit menandakan pusat suatu kota tersebut berada. Pembagian wilayah berdasar peraturan daerah pun terbentuk melalui kawasan dengan BWK I, BWK II dan seterusnya. Lebih khusus bagaimana di Kota Semarang dengan visi misi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, BWK 1 merupakan pusat kawasan yang memiliki fungsi perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan kawasan segitiga emas (Pemuda, Pandaran, Gajahmada) serta Simpang Lima sebagai pusat kegiatannya atau CBD (Central Business District). Dimana wilayah tersebut tidak terlepas pula dengan keberadaan pemukiman-pemukiman warga kampung di sekitarnya.

Keberadaan mereka yang tinggal tepat di tengah kota yakni dalam hal ini merupakan masyarakat Kampung Sekayu dan Kampung Jayenggaten menjadi suatu ancaman tersendiri bagi eksistensi atas kampung mereka sendiri. Masyarakat Kampung Sekayu dan Kampung Jayenggaten mereka di hadapkan dengan keadaan yang memaksa mereka untuk bergeser pindah dari

tempat tanah kelahiran mereka sendiri. Wilayah di sekitar mereka pun menjadi gedung tinggi seperti mall dan hotel. Perubahan atas fisik maupun non-fisik jelas dirasakan. Perubahan ekonomi, sosial maupun budaya adalah dampak atas itu semua.

